

## ANTISIPASI MUNCULNYA KLASTER PTM TERBATAS

# Pemkot 'Wanti-wanti' Protokol Tak Boleh Longgar

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya mewanti-wanti agar penerapan protokol dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sejumlah sekolah untuk tidak longgar. Hal ini guna mengantisipasi munculnya klaster penularan Covid-19 seperti yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, penekanan yang dilakukannya melalui dua lapis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). "Pertama itu melalui sarana dan prasarana. Itu sudah berhasil kita jamin sebelum penyelenggaraan PTM. Kedua menyangkut mekanisme keluar dan masuk siswa," jelasnya, Jumat (24/9).

Selain itu selama beberapa kali pihaknya juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas. Hasilnya penerapan protokol mampu di-

jalankan dengan baik. Hanya, evaluasinya menyangkut ketika siswa berada di luar sekolah. Hal ini karena selama berada di lingkungan sekolah protokolnya mampu ditegakkan oleh gugus tugas di sana. Seperti ketika siswa datang atau masuk melalui jalur yang berbeda pada saat pulang. Begitu pula saat menunggu jemputan, disiapkan ruang antrean.

Sejumlah aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan selama di sekolah juga telah ditiadakan. Antara lain kantin sekolah ditutup dan tidak ada ekstrakurikuler. Sehingga pertemuan anak tidak bisa seekspressif

ketika pembelajaran tatap muka sebelum pandemi.

"Kesiapan menggelar pembelajaran tatap muka sudah sejak lama, periode Januari. Aturan juga sudah ada. Harus ada persetujuan orangtua dan tidak memaksa harus PTM. Bagi yang ingin belajar daring tetap difasilitasi," tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap semua pihak mengedepankan kejujuran. Terutama jika ada civitas sekolah yang kurang sehat atau pernah bersinggungan dengan pasien positif Covid-19. Meski penerapan protokol yang ketat serta lingkungan yang sehat, namun kejujuran semua pihak tetap menjadi aspek yang paling penting dalam menghindari paparan virus Corona.

Sementara itu Ketua Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogya Wahyu Wijayanto juga menyuarakan kejujuran siswa dan

orangtua atau wali yang mengikuti PTM terbatas di sekolah. Jika anaknya sedang kurang fit atau baru melakukan perjalanan luar daerah, seyogyanya menahan diri mengikuti pembelajaran tatap muka. "Kami sudah melakukan pemantauan selama tiga hari berturut-turut di sejumlah sekolah yang berbeda. Protokolnya mampu dijalankan dengan baik. Namun catatan kami pada kejujuran saja supaya jangan sampai kecolongan," jelasnya.

Salah satu rekomendasi yang diberikan Forpi ialah evaluasi secara berkelanjutan oleh pihak sekolah maupun Disdikpora. Hal ini agar protokol kesehatan selalu berjalan dengan baik. Pasalnya, gugus tugas di sekolah memiliki beban yang cukup tinggi dalam mengawal penerapan protokol. Jika pada kondisi sibuk, beban akan semakin berat dan berpotensi terjadi kelonggaran. **(Dhi)-f**

## Vaksinasi Khusus Perempuan dan Ibu Hamil



KR - Warisman

### Kegiatan vaksinasi di Pura Pakualaman

**YOGYA (KR)** - Lima organisasi wanita se-DIY, bekerjasama dengan Viva Muda Cosmetic menggelar Percepatan Vaksinasi Khusus Perempuan dan Ibu Hamil di Pura Pakualaman, Jumat (24/9). Lima organisasi wanita tersebut masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY, SONJO, Korem 072 Pamungkas, Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM dan didukung oleh SKH *Kedaulatan Rakyat*. Dalam kegiatan ini, sebagai leading sektor Tim Penggerak PKK DIY. Penjelasan ini disampaikan oleh Ketua Panitia yang juga Sekretaris Tim Penggerak PKK DIY Anggi Bambang MBA.

"Vaksin dosis 1 ini target peserta 1000 orang dengan vaksin Sinovac," jelas Anggi Bambang. Menurutnya, pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan link maupun manual hanya dengan membawa KTP untuk mempermudah pendaftaran.

Sementara Direktur Distribusi Viva Indonesia Timur, Yusuf menjelaskan kegiatan ini merupakan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Viva Cosmetic mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi di Indonesia terutama untuk perempuan dan ibu hamil.

Sedangkan GKBRAA Paku Alam menyatakan, semua orang bisa vaksin meskipun KTP bukan DIY. Menurutnya perempuan di DIY masih banyak yang belum vaksin. Ia mengajak para perempuan bersedia divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menyambut baik banyaknya perempuan relawan yang ikut dalam kegiatan vaksinasi. Vaksinasi juga dihadiri Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Prof Dr Inajati Adrisjanti. **(War)-f**

## BIAYA OPERASIONAL BERAT

# GL Zoo Hanya Buka 2 Kali Seminggu

**YOGYA (KR)** - Merasa berat menanggung biaya operasional selama masa uji coba pembukaan destinasi wisata, Gembira Loka Zoo (GL Zoo) Yogyakarta pilih buka hanya saat akhir pekan atau Sabtu - Minggu saja. "Jadi mulai Senin pekan depan GL Zoo tidak buka penuh, tapi hanya buka 2 kali dalam seminggu, Sabtu - Minggu. Ini untuk mengurangi beban operasional yang kami tanggung," kata Direktur Utama GL Zoo KMT A Tirtodiprojo, saat menyampaikan evaluasi selama 10 hari melakukan uji

coba pembukaan destinasi wisata di kebun binatang setempat, Kamis (23/9).

Sebelumnya, GL Zoo merupakan salah satu dari 20 destinasi wisata di Jawa yang boleh melakukan uji coba pembukaan destinasi. Uji coba bersama dua tempat wisata lain di DIY, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 ini dilakukan sejak 13 September lalu. "Setelah uji coba selama 10 hari ternyata pengunjung yang bisa masuk rata-rata per-hari tidak lebih 70 orang saja," keluh Joko sapaan akrab KMT A



KR-Franz Boedikusumanto

### KMT A Tirtodiprojo

Tirtodiprojo.

Menurutnya, salah satu minimnya jumlah pengunjung selama masa uji coba tersebut karena anak usia di bawah 12 tahun tak bisa

masuk lantaran belum divaksin. Mereka yang tak lolos aplikasi PeduliLindungi itu disebutkan mencapai 5 atau 6 kali dari yang lolos masuk perharinya. "Kalau yang bisa masuk hari itu 30 orang, berarti yang ditolak sekitar 200-an orang karena orangtua biasanya bawa anak kecil yang belum vaksin," ucap Joko.

Dia menyadari pentingnya peraturan pemerintah yang mewajibkan wisatawan lolos aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk selama masa uji coba pembukaan destinasi

wisata tersebut. Karena kalau tidak diterapkan seperti itu pengunjung dari luar kota akan berbondong-bondong menuju objek wisata, dan akan menimbulkan kerumunan. "Jadi, kami bukan memprotes kebijakan itu. Kami tetap mendukung kebijakan pemerintah," jelasnya.

Selama buka saat weekend bagi wisatawan nantinya, pada pagi mulai jam 6 hingga jam 8 GL Zoo juga membuka kegiatan olahraga bagi mereka yang gemar olahraga pagi. **(Mus)-f**

## 16 Mahasiswa UWM Terima Beasiswa



KR-Istimedia

### Rektor secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa.

**YOGYA (KR)** - Sebanyak 16 mahasiswa Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta mendapatkan beasiswa Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank BPD DIY. Penyerahan beasiswa dilaksanakan, Jumat (24/9) di Ruang Sidang Rektorat UWM dengan prokes diwakili 4 mahasiswa penerima beasiswa.

"Sebagai kampus berbasis budaya dengan nilai-nilai luhur, UWM berterimakasih pada Bank BPD DIY yang memberikan beasiswa, dan terus meningkat jumlah kuantanya dari sebelumnya," tutur Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEd dalam sambutan.

Turut hadir Pemimpin Cabang Bank BPD DIY Senopati Sumarno SE beserta jajaran, dan Wakil Rektor I UWM Dr Jumadi SE MM. "Pemberian subsidi kepada mahasiswa yang dilakukan UWM tahun ini paling banyak untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan sehingga menjadi insan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa," jelasnya.

Sedangkan Sumarno menyebutkan meski di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. **(Vin)-f**

## Homeschooling HSPG Gelar Asesmen Nasional

**YOGYA (KR)** - Homeschooling HSPG Yogyakarta menggelar Asesmen Nasional (AN) Gelombang II, selama dua hari, 22-23 September 2021. AN adalah program dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) untuk menilai mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.

General Manager Homeschooling HSPG, Anggo Marantika MSc mengatakan, AN diikuti oleh siswa kelas XI jenjang SMA, guru-guru (termasuk guru BK dan psikologi) secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hari pertama, siswa mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengetahui kemampuan literasi siswa. Sedangkan asesmen untuk guru berupa survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen hari kedua untuk mengukur kemampuan nu-

merasi siswa dan survei karakter siswa.

"Homeschooling HSPG dinilai layak untuk menyelenggarakan sendiri AN secara luring. Selain memiliki laboratorium komputer lengkap, sarana dan prasarana yang dimiliki juga sangat mumpuni untuk mendukung AN dengan proses ketat. Penyelenggaraan AN selama dua hari berjalan lancar dan aman," terang Anggo, Jumat (24/9).

Menurut Anggo, Asesmen Nasional berbeda dengan Ujian Nasional (UN). Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memper-

baiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa.

Direktur Homeschooling HSPG Ir Kusnanto MM mengatakan, survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tergolong rendah. Hal inilah yang mendorong Pemerintah melakukan pemetaan/asesmen untuk mendapatkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar-mengajar. **(Dev)-f**



KR-Devid Permana

### Siswa Homeschooling HSPG saat mengikuti Asesmen Nasional.

## Pentingnya Penilaian Bangunan Cagar Budaya

**YOGYA (KR)** - Indonesia memiliki begitu banyak bangunan cagar budaya yang hingga saat ini belum dinilai sebagai salah satu aset kekayaan negara. Untuk itulah perlunya dilakukan penilaian bangunan cagar budaya sehingga dapat masuk sebagai kekayaan dalam laporan keuangan negara.

"Sudah cukup lama Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi tantangan kepada kami untuk menilai aset-aset cagar budaya tersebut. Sebab hingga saat ini banyak aset yang belum tertata dan dinilai," kata Ketua DPD Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) DIY Uswatun Khasanah di tengah Musyawarah Daerah (Musda) III di Hotel Marriot Yogyakarta, Jumat (24/9). Kegiatan tersebut berlangsung dua hari hingga Sabtu (25/9).

Menurutnya, melalui musda ini secara awal dibahas terkait upaya penilaian bangunan cagar budaya. Pasalnya selama ini yang sudah memiliki standar penilaian barulah lahan atau tanah tempat bangunan cagar budaya tersebut berdiri.

"Kami menindaklanjuti keinginan Bu Sri Mulyani. Hanya saja memang belum ada standar penilaian bangunan cagar budaya tersebut. Sehingga kami memiliki inisiatif untuk melakukan kajian sehingga

nantinya ada best practice terkait penilaian tersebut, seperti aspek sejarah, lokasi, ekonomi, bangunan dan lainnya," sambung Uswatun.

Pihaknya juga menegaskan bahwa penilaian ini bukan lantas untuk menjual bangunan cagar budaya. Tapi jika milik pemerintah, bisa menjadi salah satu unsur laporan keuangan. Selain itu dengan mengetahui nilainya, dapat dijadikan pegangan untuk optimalisasi tanpa meninggalkan cagar budaya tersebut.

Dalam rangkaian musda ini juga diselenggarakan Program Profesi Lanjut (PPL) yang diikuti secara online 380 peserta dari berbagai daerah termasuk Malaysia. Turut serta menjadi narasumber beberapa pemateri yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, yakni Dr Junainah Mohamad dari Kelantan University Malaysia, Dr Amiluhur Soeromo MM MSc CHE dari Magister Administrasi Publik UGM, Dr Amos Setiadi MT (Jurusan Teknik Arsitektur UAJY), Dr Akhmad Makhfatih MA (FEB UGM), Ir Hamid Yusuf MM (Ketua KPSPI MAPPI). "Maksud PPL ini sebagai langkah nyata dan peran MAPPI dalam proses penyelenggaraan aset daerah dan negara," tukasnya. **(Feb)-f**



### Siswa Homeschooling HSPG saat mengikuti Asesmen Nasional.

## BKKBN GANDENG MAHASISWA

# Stunting Bisa Menghambat Generasi Emas

**YOGYA (KR)** - Masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting sebesar 27,67 persen pada tahun 2019.

Walaupun angka stunting ini menurun, namun angka tersebut masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

"Mempersiapkan generasi emas 2045 bukan mudah. Pasalnya, stunting

masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun di Indonesia. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045," ungkap Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K), Jumat (24/9) di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Untuk itu pihaknya menggandeng perguruan tinggi dengan meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting. Hal itu dikarenakan mahasiswa yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu lewat KKN, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja dan kegiatan lainnya di tengah warga.

Hasto juga mengingatkan pentingnya menyiapkan kesehatan yang prima

sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Hasto mengkritik kebiasaan masyarakat yang memilih mengeluarkan biaya hingga puluhan juta untuk sekadar melakukan prewedding, tapi tidak memikirkan hal yang lebih mendasar yakni prakonsepsi.

"Prakonsepsi itu sangat murah, calon ibu hanya minum asam folat, periksa hb (hemoglobin), minum tablet tambah darah gratis kalau di Puskesmas, biaya untuk persiapannya tidak lebih Rp 20.000. sementara, suami hanya perlu mengurangi rokoknya, kemudian minum zinc supaya spermanya bagus. Kalau mau menikah, laki-lakinya itu harus menyiapkan 75 hari sebelum menikah. Karena sperma dibuat selama 75 hari," jelas Hasto. **(Ndw)-f**



KR-Istimedia

### Agus Suprpto dan Hasto Wardoyo saat meluncurkan program Mahasiswa Peduli Stunting.